

ABSTRAK

Tsania: *Pelantikan-Pelantikan Presiden Indonesia dari Tahun 1949-2019*

Pelantikan presiden di Indonesia bukan sekadar ritual formal, melainkan cerminan dari perjalanan sejarah kekuasaan yang panjang dan kompleks, mulai dari legitimasi spiritual pada masa kenabian, ritual sakral kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Mataram Islam, intervensi birokrasi kolonial Belanda, hingga mekanisme konstitusional pasca kemerdekaan. Pergeseran sumber legitimasi kekuasaan dari otoritas kosmologis kemerdekaan raja-raja Nusantara menuju kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berlangsung secara bertahap dan tidak sepenuhnya tuntas. Penelitian ini secara temporal dibatasi pada periode 1949-2019, sejak pengakuan kedaulatan Indonesia hingga akhir masa jabatan Joko Widodo, dengan penekanan spasial pada institusi pusat seperti MPR RI dan Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu bagaimana proses pemilihan presiden Indonesia berlangsung pada rentang waktu tersebut, serta bagaimana prosesi pelantikannya dilaksanakan dari masa ke masa. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perubahan mekanisme suksesi kepresidenan sekaligus menganalisis fungsi ideologis dari ritual pelantikan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan memanfaatkan sumber-sumber primer berupa arsip ANRI, dokumen Perpustakaan Nasional, risalah Sidang MPR/MPRS, hasil KPU, teks konstitusional, video pelantikan setiap presiden, serta pemberitaan surat kabar yang sezaman. Sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menggunakan teori *invented tradition* Eris Hobsbawm untuk membaca ritual pelantikan sebagai praktik yang secara sengaja dikonstruksikan guna menanamkan keterhubungan dengan sejarah pelantikan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan presiden Indonesia dalam kurun waktu tujuh dekade dapat dipetakan ke dalam tiga fase yang berbeda secara fundamental: masa Soekarno (fase non pemilihan), fase transisi pascareformasi, dan fase pemilihan langsung yang dimandatkan oleh rakyat. Adapun pada aspek ritual pelantikan, penelitian ini menemukan bahwa acara seremoni tersebut secara konsisten berfungsi sebagai "membuat tradisi" yang bekerja secara berbeda-beda sesuai tingkat legitimasi yang dimiliki setiap presiden pada eranya masing-masing.